BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era keterbukaan informasi publik, setiap badan publik atau lembaga pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu lembaga Badan Pusat Statistik (BPS). BPS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berperan dalam penyediaan data statistik di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS mengemban tugas utama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Muwahadah, 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, BPS menjalankan serangkaian program pengumpulan data sistematis melalui sensus dan berbagai jenis survei, untuk kemudian mengolah dan mendistribusikan hasil statistik tersebut kepada publik. Data statistik yang dihasilkan BPS menjadi fondasi penting bagi berbagai pihak mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga para pemangku kepentingan dari sektor swasta dan akademis dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis di beragam sektor pembangunan.

Sejalan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik, peran BPS telah mengalami perluasan signifikan. Tidak lagi sekadar bertugas menghasilkan data statistik, tetapi BPS juga memiliki kewajiban hukum untuk menjamin aksesibilitas publik terhadap informasi tersebut melalui mekanisme penyebarluasan yang transparan dan inklusif, sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 (UU KIP). Untuk mengimplementasikan kewajiban tersebut secara efektif, BPS tidak hanya mengandalkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan diseminasi informasi, tetapi secara proaktif mengoptimalkan fungsi Hubungan Masyarakat atau Humas dalam menyediakan beragam informasi publik

Penerapan Strategi.., Fathia Azzara Mumtaz, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

meliputi kegiatan kelembagaan, program-program statistik yang akan diselenggarakan, serta berbagai temuan fenomena sosial-ekonomi yang teridentifikasi melalui rangkaian kegiatan pendataan yang wajib diketahui oleh publik.

Namun, dalam melaksanakan tugasnya Humas BPS mengalami berbagai hambatan dan kendala. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara awal (20 Oktober, 2024) kendala utama yang dihadapi humas BPS yakni sulitnya mengomunikasikan program-program pendataan BPS yang bersifat teknis, seperti sensus dan survei ke dalam narasi yang menarik dan dapat dimengerti oleh berbagai kalangan masyarakat. Karena, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program tersebut seringkali menyebabkan munculnya sikap resistensi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pendataan yang dilakukan, sehingga berpotensi menghambat keberhasilan pengumpulan data statistik yang akurat dan representatif baik BPS pusat maupun BPS di berbagai penempatan.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait strategi komunikasi Humas BPS dalam sosialisasi program pendataan BPS oleh Hafiddin, Norhabiba dan Rizqi (2022) berjudul "Strategi Komunikasi Humas Badan Pusat Statistik Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Sensus Ekonomi Di Kabupaten Bangkalan Madura" dan Sari Annisa Wulan (2023) dengan judul "Strategi Komunikasi Humas Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Dalam Program Registrasi Sosial Ekonomi 2022" juga mengkonfirmasi permasalahan tersebut, penelitian-penelitian ini mengungkapkan bahwa petugas pendataan BPS kerap mengalami kendala saat melaksanakan tugasnya seperti masyarakat menolak untuk didata karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap program pendataan yang dilakukan, lalu kurangnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data yang juga mengindikasikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPS.

Selain itu, data strategis yang dihasilkan BPS juga memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan kemampuan komunikasi publik yang cermat. Setiap informasi statistik memerlukan proses penyederhanaan dan penerjemahan kedalam bahasa yang lebih sederhana tanpa menghilangkan esensi dan akurasi informasinya. Sehingga, dalam penyusunan pesan dan format penyajian informasi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menjangkau pemahaman dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari masyarakat awam hingga kalangan akademis dan profesional. Kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap data BPS kerap menimbulkan opini negatif terhadap BPS seperti program pendataan yang dilakukan tidak akurat dan keberpihakan BPS terhadap pemerintah.

Mengacu pada kendala tersebut, artinya dalam memenuhi kebutuhan publik akan informasi bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak hanya sekedar memberikan informasi, Humas harus mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh lapisan masyarakat (Muwahadah, 2021). Hal ini menggarisbawahi bahwa tanggung jawab Humas BPS tidak hanya sekedar menyajikan informasi statistik yang transparan dan akurat, tetapi juga harus mampu mengemas informasinya dengan metode penyampaian yang efektif agar mudah dipahami publik. Karena, penyebaran informasi yang baik juga merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan atau mendukung program yang dibuat oleh lembaga yang diwakilinya.

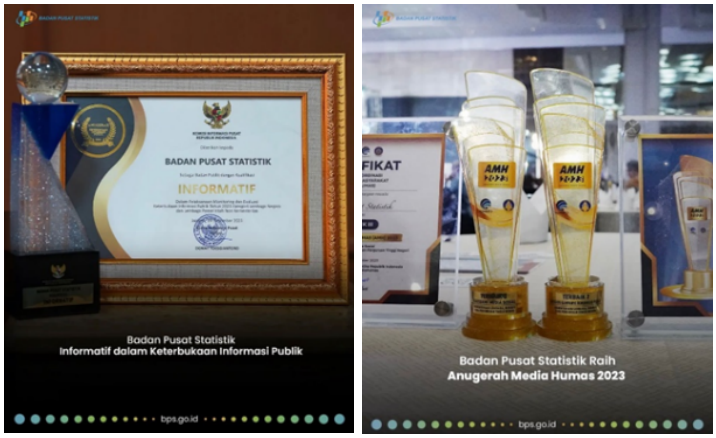
Permasalahan ini penting untuk dikaji lebih dalam karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh Humas BPS dapat berakibat fatal bagi keberhasilan BPS di era keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan upaya dalam penerapan strategi komunikasi yang lebih optimal oleh Humas BPS dalam rangka memastikan informasi dan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi yang tidak sekadar berfungsi sebagai panduan arah, tetapi juga dapat memberikan kerangka operasional yang jelas dan terukur melalui integrasi proses perencanaan dan pengelolaan yang sistematis. Penerapan strategi komunikasi yang adaptif dan fleksibel tersebut, dapat

membantu Humas dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Hasibuan & Yolanda, 2023). Penerapan Komunikasi yang efektif dan mudah dipahami juga dapat memastikan keberhasilan suatu lembaga (Giarinni, 2022).

Sebagai upaya penyebaran informasi, Humas BPS memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, X (Twitter), YouTube, dan Facebook sebagai saluran efektif untuk menyampaikan informasi penting terkait kegiatan statistik seperti ruang lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan, hingga data statistik yang dihasilkan. Pendekatan strategi komunikasi ini dirancang secara strategis oleh Humas BPS dengan membuat konten yang menarik, informatif, dan variatif, bertujuan menghadirkan informasi statistik yang kompleks dalam format yang mudah dipahami dan dicerna oleh beragam segmen masyarakat.

Selain itu, Humas BPS juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sebagai bentuk edukasi statistik kepada masyarakat luas. Kegiatan ini ditujukan agar masyarakat dapat memahami maksud, tujuan dan manfaat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BPS seperti survei, sensus dan sebagainya. Lalu, kegiatan lain seperti jumpa pers juga dilakukan secara berkala dan konsisten dengan pihak media massa untuk merilis BRS atau Berita Resmi Statistik. Upaya-upaya strategi komunikasi ini dilakukan oleh Humas BPS agar informasi yang perlu diketahui oleh publik dapat tersebar secara merata dan dipahami dengan baik oleh publik.

Sebelumnya, pada tahun 2023, BPS berhasil menjadi Badan Publik dengan kualifikasi “Informatif” dari kategori lembaga pemerintah non kementerian dalam anugrah keterbukaan informasi publik dengan nilai 90,86. Tak hanya itu, Humas BPS juga mendapatkan penghargaan Anugerah Media Humas 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Humas BPS berhasil meraih predikat "Terbaik ke-2 Kategori Kampanye Komunikasi Publik" dan "Terbaik ke-3 Kategori Media Sosial untuk Kementerian/Lembaga". Namun meskipun demikian, ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat melaksanakan tugasnya masih terdapat hambatan dan kendala yang dialami.



Gambar 1. 1 BPS Raih Penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Anugerah Media Humas 2023

Kepatuhan Badan Pusat Statistik atau lembaga pemerintah lainnya terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, terbuka, dan melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan negara, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi (Sumarto dan Desanta, 2016).

Peranan Humas dalam setiap lembaga pemerintahan di era keterbukaan informasi ini sangat penting dalam membuka ruang akses informasi seluas-luasnya untuk publik. Karena, berdasarkan tugas dan fungsinya, Humas bertanggung jawab dalam mengelola serangkaian aktivitas sistematis seperti pengumpulan dan pengolahan informasi, menjamin transparansi kepada publik, serta menyebarluaskan informasi kelembagaan, termasuk program kebijakan, implementasi kegiatan, pencapaian kinerja, hingga pengelolaan umpan balik dan aspirasi masyarakat (Radiansyah & Sabilla, 2022).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dapat menjadi instrumen penting yang dapat mendorong Humas menjalankan fungsi fundamentalnya dalam memberikan penerangan, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Melalui UU KIP, Humas pemerintah termasuk Humas BPS dapat menyampaikan berbagai kebijakan dan aktivitas pemerintahan dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan objektivitas, sehingga tercipta komunikasi yang terbuka dan akuntabel antara pemerintah dan publik (Hasibuan & Yolanda, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Penerapan Strategi Komunikasi Oleh Humas Badan Pusat Statistik dalam Penyebaran Informasi Publik". Penelitian ini penting untuk dilakukan karena strategi komunikasi Humas sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan lembaga pemerintah di era keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan konsep langkah-langkah strategi komunikasi oleh Anwar Ariffin (1984) dan konsep POAC sebagai pisau analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi komprehensif mengenai penerapan strategi komunikasi yang diterapkan oleh humas BPS dalam proses penyebaran informasi publik serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, secara garis besar fokus dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana penerapan strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas BPS dalam menyebarkan informasi publik khususnya informasi statistik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah :

1. Bagaimana penerapan strategi komunikasi Humas BPS dalam menyebarkan informasi publik berupa informasi statistik?
2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh Humas BPS dalam menyebarkan informasi publik tersebut dan bagaimana cara mengatasinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada konteks dan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi komunikasi Humas BPS dalam penyebaran informasi publik

2. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyebaran informasi publik oleh Humas BPS dan cara mengatasinya

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu komunikasi serta memperkaya penerapan konsep strategi komunikasi Anwar Ariffin dalam konteks penyebaran informasi publik.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi BPS: Memberikan rekomendasi untuk Humas BPS dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih inovatif dan adaptif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat: Membantu masyarakat dalam memahami cara BPS menyebarkan informasi publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi statistik dan lebih proaktif dalam memberikan umpan balik kepada BPS.